

DAMPAK SISTEM INFORMASI KEUANGAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

FAJRI JUNAFRI YOGA

NPP. 29.0205

*Asdaf Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
Program Studi Keuangan Publik*

Email: fajrijunafriyoga@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Regional Financial Management Information System (SIPKD) is an integrated application that provides benefits in regional financial management supported by information technology, hardware and networks. **Purpose:** The purpose of the study was to find out how the impact of the financial information system on the effectiveness of financial management in Pesisir Selatan Regency, to find out the problems of SIPKD and the efforts made by the government in dealing with them. **Method:** This research is a qualitative research with descriptive research methods and through an inductive approach. Data collection techniques are by using observation, interviews, and documentation. The steps of data analysis used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research uses Information Systems theory with 3 dimensions, namely organization, management, technology and financial management theory with dimensions of the government's ability to manage regional finances. **Result:** Based on the research results, the use of SIPKD in regional financial management has not been fully effective, and the objectives of SIPKD itself have not been maximally achieved. This is caused by employees who are still not proficient in using SIPKD, the supporting facilities are not maximized, the network in operating SIPKD can still have errors, and the existing information has not been updated on the website. Because the maximum impact of SIPKD on the effectiveness of regional financial management has not been achieved, the Pesisir Selatan Regency government has made efforts to make it happen. **Conclusion:** Efforts are being made to continue to conduct training for employees regarding the operation of SIPKD, update employee recruitment methods, improve employee discipline, optimize networks, and improve facilities, often provide training so that employees improve their skills, employees provide SIPKD operation modules, install antivirus to maintain data security, maintenance of the facility.

Keywords: Financial Management, Information System, and Management Effectiveness

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi terpadu yang memberikan manfaat dalam pengelolaan keuangan daerah yang didukung dengan teknologi informasi, perangkat keras maupun jaringan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana dampak dari sistem informasi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, mengetahui permasalahan dari SIPKD dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanganinya. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode

penelitian deskriptif dan melalui pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun langkah-langkah analisa data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan teori Sistem Informasi dengan 3 (3) dimensi yaitu organisasi, manajemen, teknologi serta teori pengelolaan keuangan dengan dimensi kemampuan pemerintah mengelola keuangan daerah. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya efektif, dan tujuan dari SIPKD sendiri belum tercapai dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh pegawai yang masih belum mahir dalam penggunaan SIPKD, fasilitas yang mendukung belum maksimal, jaringan dalam pengoperasian SIPKD masih bisa *error*, dan informasi yang ada belum terupdate di *website*. Karena belum tercapainya dampak yang maksimal dari SIPKD terhadap efektifnya pengelolaan keuangan daerah, maka pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan suatu upaya untuk mewujudkannya. **Kesimpulan:** Upaya yang dilakukan adalah terus melakukan pelatihan bagi pegawai mengenai pengoperasian SIPKD, memperbaharui cara rekrutmen pegawai, meningkatkan disiplin pegawai, mengoptimalkan jaringan, serta memperbaiki fasilitas, sering memberikan pelatihan agar pegawai semakin mahir, memberikan pegawai modul pengoperasian SIPKD, memasang antivirus untuk menjaga keamanan data, perawatan terhadap fasilitas.

Kata kunci: Efektivitas Pengelolaan, Pengelolaan Keuangan, dan Sistem Informasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini Indonesia sedang ada dalam proses membangun pemerintahan yang baik, menuju pemerintahan *good governance* dan *clean government*. Harapan masyarakat terhadap pemerintah supaya bisa berlaku transparan dan akuntabel agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Keberhasilan dari pemerintahan daerah dapat dilihat dari hasil pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang baik serta transparan.

E-Government ataupun *Electronic Government* merupakan wujud upaya dari pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi elektronik yang berguna untuk membagikan suatu informasi serta pelayanan untuk masyarakat, dan juga urusan-urusan lain yang berhubungan dengan Pemerintahan. *E-Government* bentuk nyata dari sistem informasi bagi pemerintah, pelaksanaan dari sistem informasi manajemen dalam pemerintahan digunakan untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dari informasi maupun layanan. Sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, bahwa seiring dengan berjalannya perkembangan teknologi, maka akses informasi untuk masyarakat luas akan semakin mudah terhadap jalannya pemerintahan, oleh karena itu pemerintah memerlukan berupa sistem informasi keuangan yang terbuka dan memudahkan dalam proses konsolidasi. Bentuk dari sistem informasi keuangan itu adalah Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah sarana yang dibentuk oleh Menteri Keuangan untuk menghimpun, mengesahkan, mengolah, menganalisis, dan menyediakan informasi keuangan daerah dalam rangka perumusan kebijakan dalam penyaluran Dana Perimbangan, evaluasi kinerja keuangan daerah, penyusunan Rancangan Pendapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), serta memenuhi tanggung jawab lainnya. Sistem informasi dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pengelolaan keuangan daerah. Keharmonisan penyelenggaraan APBD dan APBN yang berdampak langsung pada kinerja

otonomi daerah dan upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah berbasis IT, pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi diterapkan agar pengelolaan keuangan daerah dapat dipantau dan dikontrol dengan baik serta mencegah terjadinya peyalahgunaan anggaran. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu dari 12 Kabupaten dan 7 Kota yang menerapkan sistem informasi keuangan dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

SIPKD memberikan manfaat terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, seperti memudahkan dalam pengimputan data, akurat dalam perhitungan, serta dapat mempercepat proses transaksi, efisien dalam waktu pengerjaan dan biaya, adanya transparansi anggaran, serta mempercepat proses penyusunan laporan keuangan, akan tetapi tetap ada kendala dalam pelaksanaan sistem informasi keuangan tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pelaksanaan sistem informasi keuangan masih ada beberapa kendala dan hambatan yang perlu diperbaiki, agar sistem informasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Penyebabnya berupa adanya kendala teknis dan terbatasnya sumber daya aparatur yang menguasai keahlian dibidang keuangan, dan juga dalam bidang teknologi informasi sehingga menyebabkan penyesuaian penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) mengalami kendala dan hambatan.

Dalam membangun sistem informasi keuangan yang baik, maka dibutuhkan sumber daya aparatur yang bisa menguasai keahlian di bidang keuangan dan juga pada bidang teknologi informasi. Penjelasan dari staff bagian pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan masih ditemukan sebagian pegawai pemerintah kabupaten, kecamatan, maupun nagari yang belum mahir dan mampu dalam pengelolaan sistem ini. Selain diperlukannya sumber daya yang ahli dalam bidang teknologi informasi, untuk membangun sistem informasi yang handal juga dibutuhkan biaya. Pemeliharaan aplikasi membutuhkan biaya yang besar. Kemampuan penganggaran sangat dibutuhkan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang SIPKD, serta untuk membeli dan memperbaharui sistem secara berkala. Menurut operator SIPKD, permasalahan yang sering timbul dan sangat berpengaruh ialah adanya gangguan jaringan. Terkadang koneksi jaringan yang digunakan tidak stabil dan sering terputus. Apabila terjadi gangguan sistem pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, maka sistem yang lain ikut terganggu dan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan SIPKD, sehingga dengan adanya kendala tersebut menyebabkan adanya keterlambatan seperti pada bagian pelaporan keuangan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengelolaan keuangan maupun konteks sistem informasi. Penelitian Yulia berjudul Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Yulia, 2017), menemukan bahwa penerapan SIPKD memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.. Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian semakin baik Sistem Pengendalian Intern maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan. Penelitian Yuswardi menemukan bahwa pelatihan, pemanfaatan SIPKD, kompetensi dan pengendalian intern secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SIPKD dan Gaya kepemimpinan tidak mampu memoderasi hubungan antara pelatihan, pemanfaatan SIPKD, kompetensi dan pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan pada SKPD (Yuswardi,

2017). Penelitian Ayu dan Suyana menemukan bahwa penerapan SIPKD dapat berjalan efektif karena kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan dan kualitas SDM secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna dan berpengaruh positif terhadap manfaat bagi organisasi (Ayu dan Suyana, 2018).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni bagaimana dampak dari sistem informasi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, metodenya yang digunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif yang berbeda dengan penelitian Yulia, Yuswardi, maupun Ayu dan Suyana.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai dampak sistem informasi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

II. METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dan melalui pendekatan induktif. Dalam tipe kualitatif ini Anggito dan Setiawan (2018: 7), memberi pernyataan bahwa penelitian yang bersifat kualitatif digunakan dalam latar alamiah yang bertujuan untuk menafsirkan fenomena yang dilakukan dan terjadi yang melibatkan berbagai macam metode yang ada.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan, sekretaris BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan, kabid anggaran, kabid akuntansi, admin SIPKD, dan operator SIPKD.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis dampak sistem informasi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan pendapat dari Hartono yang menyatakan bahwa dampak dalam pemanfaatan SIPKD ada terjadinya permasalahan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Dampak Sistem Informasi Keuangan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peneliti melakukan penelitian terhadap dampak sistem informasi keuangan terhadap bagaimana pengelolaan keuangan daerah, apakah sudah berjalan efektif atau belum.

Dampak dari penggunaan SIPKD telah memberikan manfaat yang luar biasa terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terkhusus Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai pusat pengelola keuangan daerah. BPKPAD dengan mudah menginput data dari OPD lainnya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Meskipun masih ada kendala dalam penggunaan aplikasi tersebut, namun manfaatnya sudah bisa dirasakan.

Sebelum adanya SIPKD, Kabupaten Pesisir Selatan mengelola keuangan dengan cara manual, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Proses yang secara manual tentu membutuhkan waktu yang lama, karena harus mengentri data satu persatu dari setiap OPD ke dalam pencatatan. Setelah adanya SIPKD, pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan beranjak dari manual ke penggunaan aplikasi SIPKD ini dalam pengelolaan keuangan

daerah. Hal ini dengan harapan dapat memperbaiki pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebelumnya.

Menganalisa efektivitas SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu dengan menghubungkan hasil wawancara, observasi atau pengamatan di lapangan, serta dokumentasi, dengan menggunakan Teori Hartono (2013) Teori ini mengemukakan bahwa sistem informasi berbasis komputer dapat dikatakan memberikan dampak yang efektif apabila memenuhi beberapa faktor yang terdiri dari dimensi organisasi, manajemen, teknologi serta pengelolaan keuangan.

Berdasarkan analisis dimensi-dimensi tersebut, peneliti dapat mengetahui bahwa SIPKD di Kabupaten Pesisir Selatan telah memberikan manfaat yang luar biasa kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, terkhusus pada bidang keuangan. Manfaat tersebut antara lain yaitu adanya efisien waktu dalam mengerjakan pengelolaan keuangan, pimpinan dengan mudah mengontrol realisasi anggaran, mempermudah pemerintah dalam membuat laporan keuangan dengan tampilan laporan keuangan yang sudah bagus dan dengan sistem yang telah teratur secara otomatis dengan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan, bahkan dampak penggunaan SIPKD di Kabupaten Pesisir Selatan adalah kurangnya kemungkinan salah angka pengelolaan keuangan lebih akuntabel, karena pada SIPKD akan otomatis mengoreksi kesalahan data yang dienti oleh operator. Namun dampak dari SIPKD terhadap efektivitas pengelolaan keuangan masih belum tinggi, karena disebabkan adanya faktor-faktor yang menjadi penghalang untuk mewujudkan dampak yang baik dari SIPKD. Setiap dimensi yang ada, masih terdapat indikator yang belum maskimal.

3.2. Faktor Penghambat SIPKD terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Meskipun SIPKD telah banyak membantu dalam proses pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, namun dalam penggunaan aplikasi SIPKD, Kabupaten Pesisir Selatan masih menemukan berbagai hambatan.

SDM adalah salah satu faktor utama dalam pengoperasian SIPKD. Dampak SIPKD terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan hasil observasi saat penelitian, dapat diidentifikasi bahwa Kabupaten Pesisir Selatan masih memiliki pegawai yang belum mahir dalam bidang akuntansi. Hal ini membuat keterlambatan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1

Data pegawai Tim Pelaksana SIPKD

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Status Pegawai	Kedudukan dalam Tim
1	Lusiana, S.Kom, MM.	S2	PNS	Super Admin
2	Nurzarly, A.md	D3	PNS	Admin
3	David Dwira Astradedy, A.md	D3	PNS	Admin
4	Tiara Yusiani, S.Kom	S1	PNS	Admin
5	Reni Dahlia, S.E	S1	PNS	Admin

Sumber: BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

Dapat dilihat dari tabel 1 bahkan operator SIPKD di beberapa OPD yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan ada yang tidak mahir dalam pengoperasian SIPKD. Hal ini akan mengakibatkan pusat pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah akan membutuhkan waktu yang lama dalam mengentri data dari OPD tersebut. Sehingga terjadilah ketidak efektifan dan efisiennya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, Kabupaten Pesisir Selatan sendiripun belakangan ini sering terjadi mutasi pegawai, sehingga terjadi pergantian operator dan admin SIPKD di beberapa OPD. Admin dan operator baru belum tentu mengerti dan mahir akan pengoperasian SIPKD sehingga butuh banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Berdasarkan pengamatan penulis saat penelitian, ada beberapa admin dan operator SIPKD beberapa OPD yang datang langsung ke pusat pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Maksud dari kedatangan operator OPD di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Dearah adalah untuk belajar dan bertanya tentang pengoperasian SIPKD. Sehingga Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Dearah Kabupaten Pesisir Selatan mengajari satu-satu dari setiap operator yang datang.

Budaya yang kurang baik dan telah turun temurun di kehidupan pegawai, susah untuk dihilangkan. Pada umumnya pegawai cepat datang hanya untuk absen, setelah itu keluar lagi, dan akhirnya masuknya telat. Padahal dalam aturan disiplin pegawai, tidak ada pegawai yang telat masuk, namun itu hanya sekedar peraturan saja, tidak dijalankan. Budaya kurang disiplin salah satu faktor yang akan menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan yang telah diimpikan. Dalam bidang keuangan yaitu menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, melalui peningkatan keefektivan dan efisien, suatu aplikasi dalam mengelola keuangan.

Hasil observasi dan wawancara di lapangan, ditemui bahwa dalam penyelenggaraan SIPKD di Kabupaten Pesisir Selatan kadang terkendala. Hal ini diakibatkan karena terkadang saat penggunaan aplikasi, jaringan tidak terkoneksi, meskipun terkoneksi tetapi loadingnya lama, mengakibatkan perlunya waktu yang lama dalam melakukan penginputan data. Kondisi ini terjadi karena *wireless* yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan masih memiliki kapasitas yang rendah. Gangguan jaringan juga dapat terjadi apabila sistem digunakan oleh banyak operator dan mengakibatkan sistem sering error, dan kemudian operator harus melakukan *restart* dan *log in* berulang kali pada sistem.

Berdasarkan pengamatan peneliti saat penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, fasilitas pendukung penggunaan SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah ada beberapa yang rusak. Seperti halnya komputer di ruangan bidang akuntansi ada yang rusak, sehingga hal ini mengakibatkan pegawai yang menggunakan komputer tersebut pekerjaannya tertunda, dan untuk mengatasinya pegawai tersebut menggunakan laptop sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan pekerjaan.

Penyajian informasi SIPKD juga belum disajikan secara lengkap dan jarang di-*update* pada website Kabupaten Pesisir Selatan. Padahal seharusnya output dari SIPKD dapat diakses pada website kabupaten, sehingga masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat membutuhkan keterbukaan informasi terkait dengan kinerja pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat

dipertanggungjawabkan. Guna untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

3.3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Menghadapi Kendala Penyelenggaraan SIPKD

Suatu masalah yang terjadi dalam roda pemerintahan, harus segera di atas dan diselesaikan, agar sistem pemerintahan tetap berjalan dengan lancar efektif dan efisien. Jika membiarkan suatu masalah yang ada, maka tujuan dari suatu pemerintah tidak akan tercapai. Meskipun sudah ada aplikasi, namun Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengelolaan keuangan masih tetap melakukan secara manual. Hal ini dilakukan untuk jaga-jaga apabila hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti terganggunya atau *error* nya sistem. Penggunaan aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah, masih ditemukan kendala dalam berbagai macam bidang. Hal ini tidak boleh dibiarkan pemerintah. Tercapainya tujuan dari aplikasi dan tujuan dari pemerintah, maka pemerintah harus melakukan upaya agar masalah yang terjadi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Berbagai cara dilakukan pemerintah agar meningkatnya efektivitas penggunaan SIPKD adalah berupa melakukan pelatihan bagi pegawai mengenai pengoperasian SIPKD, memperbaharui cara rekrutmen SDM, meningkatkan disiplin pegawai, serta pengoptimalan terhadap jaringan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian.

Sistem informasi keuangan memberikan banyak dampak positif bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan salah satu manifestasi nyata yang dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri. Peneliti menemukan temuan penting yakni sumber daya manusia sangat mempengaruhi bagaimana jalannya SIPKD, karena dibutuhkan sdm yang menguasai sistem informasi dan akuntansi sekaligus. Sama halnya dengan temuan Ayu dan Suyana bahwa kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna SIPKD, hal ini didukung dengan kualitas SDM dari faktor pendidikan yang baik sehingga percaya diri pengguna SIPKD dalam pengoperasionalan sistem informasi sehingga meningkatkan kepuasan bagi pengguna sistem (Ayu dan Suyana, 2018), sumber daya manusia adalah kunci berjalannya SIPKD di Kabupaten Pesisir Selatan.

Layaknya sistem informasi lainnya, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah penyampaian informasi bagi publik belum lengkap *ter-update* semuanya di *website* kabupaten, salah satunya dikarenakan belum ada data yang diberikan oleh BPKPAD kepada pihak pengelola informasi dan komunikasi, layaknya temuan Yuswardi (Yuswardi, 2017). Selanjutnya karakteristik dari sistem informasi ini yakni sistem informasi ini membutuhkan jaringan yang stabil, jadi SIPKD merupakan sistem aplikasi keuangan daerah yang beroperasi secara online. Sehingga dalam pengoperasiannya, menggunakan jaringan. Jaringan sangat berpengaruh terhadap efektivitas SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah. Jaringan yang dibutuhkan dalam penggunaan SIPKD ini adalah jaringan yang bagus, apabila terdapat masalah dalam jaringan, maka akan pengelolaan keuangan daerah akan terhambat. Hal ini mengakibatkan tujuan dari SIPKD sulit untuk diwujudkan. sesuai dengan hasil penelitian Agustino (Ayu dan Suyana, 2018).

Sistem informasi ini diperlukan fasilitas yang mendukung karena akan menyimpan arsip dari bagaimana proses pengelolaan keuangan daerah selama sistem ini masih berjalan layaknya penelitian Yulia, menemukan bahwa fasilitas yang baik dapat mendukung jalannya sistem informasi ini sehingga kemungkinan terjadinya kendala dalam pengelolaan keuangan menjadi sangat kecil (Yulia, 2017).

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa dampak penggunaan SIPKD terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dalam beberapa dimensi yang ada masih terdapat masalah pada Dimensi Organisasi dan Dimensi Teknologi, sedangkan pada Dimensi Manajemen sudah berjalan dengan baik. Selain itu faktor yang dapat menghambat jalannya SIPKD yaitu kualitas SDM, sikap kurang disiplinnya pegawai, permasalahan dalam jaringan, fasilitas yang kurang mendukung, serta informasi yang belum ter-update di *website* kabupaten. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menghadapi hambatan tersebut dapat berupa, dengan melakukan pelatihan bagi pegawai mengenai pengoperasian SIPKD, memperbaharui cara rekrutmen SDM dalam mengelola SIPKD dan memberikan syarat serta batas kemampuan bagi calon pegawai kontrak yang mengajukan lamaran, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga akan meningkatkan disiplin pegawai dengan cara memberikan peringatan kepada pegawai yang kurang disiplin dan akan menindak tegas pegawai yang masih kurang disiplin dengan memberikan berupa sanksi. Kabupaten Pesisir Selatan akan memperbaiki jaringan dengan menambah kapasitas jaringan melalui kerjasama dengan pihak Telkom, Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan juga melakukan perbaikan kerusakan pada fasilitas pendukung SIPKD dan mengganti fasilitas yang sudah rusak dengan yang baru.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu OPD saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori Hartono.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan dampak sistem informasi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak.
- Gainau, M. B. 2016. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sari, Y. R. (2017). *Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*.
- Suryaningrat, A. . A. M. (2018). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Pemerintah Provinsi Bali*. *Buletin Studi Ekonomi*, 23.
- Yuswardi. (2017). *Pengaruh Pelatihan, Pemanfaatan SIPKD, Kompetensi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kabupaten Bireuen Dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating*. Universitas Sumatera Utara.